



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 22 Juni 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Pembicaraan Pendahuluan dan Pembahasan RABPN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021; 2. Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020).
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 11 (sebelas) Anggota Komisi II DPR RI secara fisik dan 22 (dua puluh dua) Anggota Komisi II DPR RI secara virtual dari 49 (empat puluh Sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Menteri Sekretaris Negara RI C. Sekretaris Kabinet D. Kepala Staf Kepresidenan E. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara RI, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dengan agenda pembicaraan pendahuluan dan pembahasan RABPN TA 2021 dan rencana kerja Pemerintah Tahun 2021 dan evaluasi kinerja Tahun 2019 dan 2020 (hingga bulan Juni Tahun 2020), hari Senin, 22 Juni 2020,

dibuka pukul 13.40 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan Pagu Indikatif Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2021 sebesar **Rp2.051.684.103.000,-** (*dua trilyun lima puluh satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah*), termasuk didalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar **Rp86.760.233.000,-** (*delapan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). Pagu Indikatif Tahun 2021 itu naik sebesar 1,46 persen apabila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2020. Namun, apabila dibandingkan dengan Alokasi Anggaran Tahun 2020 setelah penyesuaian berkenaan dengan penanganan pandemi COVID-19, maka Pagu Indikatif Tahun 2021 naik sebesar 21,58 persen.
2. Menteri Sekretaris Negara menyampaikan usulan pergeseran anggaran dengan mempertimbangkan restrukturisasi program dan unit organisasi di Kementerian Sekretariat Negara seiring dengan kebijakan redesain sistem penganggaran, yaitu:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.328.412.171.000,-** (*satu trilyun tiga ratus dua puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp1.129.568.453.000,-** (*satu trilyun seratus dua puluh sembilan milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah*).
 - b. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar **Rp723.271.932.000,-** (*tujuh ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp922.115.650.000,-** (*sembilan ratus dua puluh dua milyar seratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).
3. Sekretaris Kabinet menyampaikan Pagu Indikatif Sekretariat Kabinet Tahun 2021 sebesar **Rp300.143.142.000,-** (*tiga ratus milyar seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*).
4. Sekretaris Kabinet mengajukan usulan tambahan anggaran Sekretariat Kabinet sebesar **Rp88.500.000.000,-** (*delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*),
5. Kepala Staf Kepresidenan mengajukan usulan anggaran Kantor Staf Presiden sebesar **Rp29.517.322.000,-** (*dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*), untuk

dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kantor Staf Presiden Tahun 2021.

6. Kepala BPIP menyampaikan Pagu Indikatif Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun 2021 sebesar **Rp208.846.742.000,-** (*dua ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*).

III. KESIMPULAN RAPAT

1. Setelah mendengarkan penyampaian Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2021:
 - a. Kementerian Sekretariat Negara sebesar **Rp2.051.684.103.000,-** (*dua trilyun lima puluh satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah*), termasuk di dalamnya adalah anggaran untuk Kantor Staf Presiden (KSP) sebesar **Rp86.760.233.000,-** (*delapan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*);
 - b. Sekretariat Kabinet sebesar **Rp300.143.142.000,-** (*tiga ratus milyar seratus empat puluh tiga juta seratus empat puluh dua ribu rupiah*);
 - c. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebesar **Rp208.846.742.000,-** (*dua ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah*);

Maka Komisi II DPR RI meminta agar dalam pengalokasian anggaran per program dan kegiatan senantiasa memperhatikan saran dan masukan yang disampaikan oleh Komisi II DPR RI, yang kemudian akan dibahas kembali secara lebih mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2021 selanjutnya.

2. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Sekretariat Kabinet sebesar **Rp88.500.000.000,-** (*delapan puluh delapan milyar lima ratus juta rupiah*), untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Sekretariat Kabinet Tahun 2021, dan meminta kepada Anggota Banggar Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR RI.
3. Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kantor Staf Presiden sebesar **Rp29.517.322.000,-** (*dua puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah*), untuk dapat ditambahkan ke dalam pagu anggaran Kantor Staf Presiden Tahun 2021, di dalam bagian anggaran Kementerian Sekretariat Negara dan meminta kepada Anggota Banggar Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Banggar DPR RI.
4. Komisi II DPR RI menyetujui usulan pergeseran anggaran Sekretariat Negara Tahun 2021, yang terdiri dari:
 - a. Program Dukungan Manajemen sebesar **Rp1.328.412.171.000,-** (*satu trilyun tiga ratus dua puluh delapan milyar empat ratus dua belas juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*) menjadi sebesar **Rp1.129.568.453.000,-** (*satu trilyun seratus dua puluh sembilan*

milyar lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- b. Program Penyelenggaraan Layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebesar **Rp723.271.932.000,-** (tujuh ratus dua puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi sebesar **Rp922.115.650.000,-** (*sembilan ratus dua puluh dua milyar seratus lima belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah*).

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 22 Juni 2020
KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG
A-270